

**PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
TERHADAP PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* PADA BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA (BKPSDM) KABUPATEN TANAH BUMBU**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat S-1

FALEHAH NABILA

1910413120010



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
BANJARMASIN**

2023



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
Jalan Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin 70123
Telepon : (0511) 3304595 Laman : <http://fisip.ulm.ac.id/>

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini Senin tanggal 20 bulan Maret tahun 2023, Tim Penguji yang ditunjuk oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dengan surat Nomor: 1588/UN8.1.13/KP.10.00/2023 tanggal 15 Maret 2023 untuk menguji Skripsi:

Nama : Falchah Nabila
NIM : 1910413120010
Jurusan/Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Pengaruh Implementasi Kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Terhadap Penerapan Good Governance pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tanah Bumbu

Tempat Ujian : Ruang Sidang Skripsi 1 Gedung Lama Fisip ULM
Waktu Ujian : 10.00 Wita – Selesai
Nilai : 83,33 (A)
Dinyatakan : Lulus / ~~Tidak Lulus~~

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani sesuai dengan peraturan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Dibuat di : BANJARMASIN
Pada Tanggal : 20-03-2023.

Tim Penguji,

Mahasiswa yang diuji,

Falchah Nabila

1. Ketua : Dr. Mahyuni, M.AP
2. Sekretaris : Dr. Samahuddin M. Harrah, M.Si
3. Anggota : Fadly, S.IP, M.IP

Mengetahui/Membenarkan :
Koordinator Program Studi Ilmu Pemerintahan

Husein Abdurahman, S.Sos M.Si
NIP 197111031999031002

Scanned with CamScanner

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Falehah Nabila

NIM : 1910413120010

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul "Pengaruh Implementasi Kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (SAKIP) Terhadap Penerapan *Good Governance* Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tanah Bumbu" benar-benar merupakan hasil karya Saya sendiri, bukan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang Saya akui sebagai hasil tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini adalah hasil duplikasi, maka Saya bersedia menerima sanksi dari perbuatan tersebut.

Hal-hal yang berkaitan dengan teknik penulisan, telah sesuai dengan pedoman Karya Tulis Ilmiah Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat.

Banjarmasin, 20 Maret 2023



embuat pernyataan

Falehah Nabila

NIM. 1910413120010

ABSTRAK

Falehah Nabila. 1910413120010. Pengaruh Implementasi Kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Terhadap Penerapan *Good Governance* Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tanah Bumbu. Dibimbing oleh Mahyuni.

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh implementasi kebijakan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) terhadap penerapan *good governance* pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tanah Bumbu.

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan tipe penelitian bersifat eksplanatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket koesioner dan dokumentasi. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif variabel, uji validitas dan reliabilitas, uji analisis regresi sederhana dan pembahasan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Pengaruh Implementasi Kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terhadap Penerapan *Good Governance* pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tanah Bumbu, dimana berdasarkan hasil analisis deskriptif variabel bebas (X) : Pengaruh Implementasi Kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berdasarkan 4 (empat) aspek implementasi dari teori Edward III yaitu aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi efektif dalam mempengaruhi penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Hasil analisis deskriptif variabel terikat (Y) : Penerapan *Good Governance* berdasarkan 7 (tujuh) indikator yaitu indikator aturan hukum, transparansi, daya tanggap, orientasi kebijakan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas dan perencanaan strategi memiliki keterkaitan satu sama lain. Hasil uji regresi sederhana diperoleh nilai regresi sebesar 0,503 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ sehingga variabel X : Pengaruh Implementasi Kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berpengaruh terhadap variabel Y : Penerapan *Good Governance*.

Saran yang dapat diberikan yaitu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tanah Bumbu agar terus meningkatkan kinerjanya terutama pada kualitas pelayanan, karena sebagai instansi yang tugas utamanya adalah meningkatkan sumber daya aparatur di lingkup pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sangat penting sebagai langkah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kata Kunci : Implementasi, *Good Governance*, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

ABSTRACT

Falehah Nabila. 1910413120010. The Influence of Performance Accountability System of Government Institution (SAKIP) towards The Implementation Good Governance on the Employment and Human Resources Development Agency (BKPSDM) of Tanah Bumbu Regency. Under supervision of Mahyuni.

This study aims to find out how the implementation of the Performance Accountability System of Government Institution (SAKIP) affects the implementation of good governance in the Employment and Human Resources Development Agency (BKPSDM) of Tanah Bumbu Regency.

In this study, it used explanatory quantitative approach for the research method. For the data collection technique, questionnaires and documentation were utilized. Then, in analyzing the data, descriptive analysis of variables, validity and reliability tests, simple regression analysis tests and discussion were employed.

The results of the study indicated that there was a significant effect between the Performance Accountability System of Government Institution (SAKIP) on the implementation of good governance in the Employment and Human Resources Development Agency (BKPSDM) of Tanah Bumbu Regency. The results found based on the descriptive analysis of the independent variable (X): The Performance Accountability System of Government Institution (SAKIP) policies based on 4 (four) implementation aspects of Edward III's theory, namely the aspects of communication, resources, disposition and the effective bureaucratic structure in influencing the implementation of the good governance. The results of the descriptive analysis of the dependent variable (Y): The implementation of good governance based on 7 (seven) indicators, namely indicators of the rule of law, transparency, responsiveness, policy orientation, effectiveness and efficiency, accountability and strategic planning were related to one another. The results of the simple regression test obtained a regression value of 0.503 with a significance value of $0.000 < 0.05$, so that X variable: The Effect of Policy Implementation on The Employment and Human Resources Development Agency (SAKIP) has an effect on variable Y: The implementation of good governance.

According to the findings and discussion, this recent study suggested that the Employment and Human Resources Development Agency (BKPSDM) of Tanah Bumbu Regency to keep improving their performance, especially in terms of service quality. It is because as an agency whose main task is to increase apparatus resources within the scope of the Tanah Bumbu Regency government, it is very important to be taken into consideration and attention as the step towards realizing good governance

Keywords: Implementation, Good Governance, Performance Accountability System of Government Institution.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR GRAFIK	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penelitian Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	10
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian	15
BAB II KERANGKA TEORI	16
2.1 Relevansi dengan Ilmu Pemerintahan	16
2.2 Tata Kelola Pemerintahan	18
2.3 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	19
2.4 Kebijakan Pemerintah	25
2.4.1 Tahapan-Tahapan Kebijakan	29
2.4.2 Ruang Lingkup Kebijakan	33
2.5 Implementasi Kebijakan Pemerintah	37
2.6 Kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	45
2.7 Model Penelitian	54
2.8 Hipotesis Penelitian	56
BAB III METODE PENELITIAN	57
3.1 Pendekatan Penelitian	57

3.2 Tipe Penelitian.....	57
3.3 Definisi Variabel dan Operasional Variabel.....	58
3.4 Populasi dan Sampel	63
3.4.1 Populasi	63
3.4.2 Sampel.....	65
3.5 Teknik Sampling.....	65
3.6 Teknik Pengumpulan Data	67
3.7 Uji Validitas dan Reliabilitas.....	68
3.8 Analisis Data	70
3.9 Jadwal Penyusunan Skripsi	75
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	76
4.1 Gambaran Umum dan Profil Responden	76
4.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Tanah Bumbu	76
4.1.2 Gambaran Umum BKPSDM Kabupaten Tanah Bumbu ..	77
4.1.3. Kondisi Sarana dan Prasarana	82
4.1.4 Struktur Organisasi BKPSDM Kabupaten Tanah Bumbu	83
4.1.5 Profil Responden	84
4.2 Hasil Penelitian	88
4.2.1 Analisis Deskriptif Variabel Independen (X)	88
4.2.2. Analisis Deskriptif Variabel Dependent (Y)	106
4.3 Analisis Data	135
4.3.1 Pengujian Validitas	135
4.3.2 Pengujian Reliabilitas	137
4.3.3 Analisis Regresi Sederhana	138
4.3.4 Hasil Analisis Hpotesis	143
4.4 Pembahasan	145
BAB V PENUTUP.....	149
5.1 Kesimpulan	149

5.2 Saran	150
DAFTAR PUSTAKA	152
LAMPIRAN	154

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Operasional Variabel	61
Tabel 3.2 Komposisi Pegawai	64
Tabel 3.3 Skala Pengukuran	66
Tabel 3.4 Jadwal Penyusunan Skripsi	75
Tabel 4.1 Kondisi Geografis Ibukota Kecamatan dan Luas Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu	77
Tabel 4.2 Rekapitulasi Data ASN BKPSDM Berdasarkan Pendidikan Menurut Jenis Kelamin	80
Tabel 4.3 Rekapitulasi Data Non ASN BKPSDM Berdasarkan Pendidikan Menurut Jenis Kelamin	80
Tabel 4.4 Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	85
Tabel 4.5 Profil Responden Menurut Usia Berdasarkan Jenis Kelamin	86
Tabel 4.6 Profil Responden Menurut Pendidikan Terakhir Berdasarkan Jenis Kelamin	87
Tabel 4.7 Tanggapan Responden Terhadap Pengaruh Implementasi Kebijakan SAKIP Berdasarkan Aspek Komunikasi	89
Tabel 4.8 Pengkategorian Variabel Pengaruh Implementasi Kebijakan SAKIP Berdasarkan Aspek Komunikasi	92
Tabel 4.9 Tanggapan Responden Terhadap Pengaruh Implementasi Kebijakan SAKIP Berdasarkan Aspek Sumberdaya	94
Tabel 4.10 Pengkategorian Variabel Pengaruh Implementasi Kebijakan SAKIP Berdasarkan Aspek Sumberdaya	97
Tabel 4.11 Tanggapan Responden Terhadap Pengaruh Implementasi Kebijakan SAKIP Berdasarkan Aspek Disposisi	99
Tabel 4.12 Pengkategorian Variabel Pengaruh Implementasi Kebijakan SAKIP Berdasarkan Aspek Disposisi	101
Tabel 4.13 Tanggapan Responden Terhadap Pengaruh Implementasi	

Kebijakan SAKIP Berdasarkan Aspek Struktur Birokrasi	102
Tabel 4.14 Pengkategorian Variabel Pengaruh Implementasi	
Kebijakan SAKIP Berdasarkan Aspek Struktur Birokrasi	105
Tabel 4.15 Tanggapan Responden Terhadap Penerapan	
<i>Good Governance</i> Berdasarkan Indikator Aturan Hukum	107
Tabel 4.16 Pengkategorian Variabel Penerapan	
<i>Good Governance</i> Berdasarkan Indikator Aturan Hukum	110
Tabel 4.17 Tanggapan Responden Terhadap Penerapan	
<i>Good Governance</i> Berdasarkan Indikator Transparansi	112
Tabel 4.18 Pengkategorian Variabel Penerapan	
<i>Good Governance</i> Berdasarkan Indikator Transparansi	115
Tabel 4.19 Tanggapan Responden Terhadap Penerapan	
<i>Good Governance</i> Berdasarkan Indikator Daya Tanggap	116
Tabel 4.20 Pengkategorian Variabel Penerapan	
<i>Good Governance</i> Berdasarkan Indikator Daya Tanggap	118
Tabel 4.21 Tanggapan Responden Terhadap Penerapan <i>Good Governance</i>	
Berdasarkan Indikator Orientasi Kebijakan	120
Tabel 4.22 Pengkategorian Variabel Penerapan <i>Good Governance</i>	
Berdasarkan Indikator Orientasi Kebijakan	122
Tabel 4.23 Tanggapan Responden Terhadap Penerapan <i>Good Governance</i>	
Berdasarkan Indikator Efektivitas dan Efisiensi	124
Tabel 4.24 Pengkategorian Variabel Penerapan <i>Good Governance</i>	
Berdasarkan Indikator Efektivitas dan Efisiensi	126
Tabel 4.25 Tanggapan Responden Terhadap Penerapan	
<i>Good Governance</i> Berdasarkan Indikator Akuntabilitas	128
Tabel 4.26 Pengkategorian Variabel Penerapan <i>Good Governance</i>	
Berdasarkan Indikator Akuntabilitas	130
Tabel 4.27 Tanggapan Responden Terhadap Penerapan <i>Good Governance</i>	
Berdasarkan Indikator Perencanaan Strategi	132

Tabel 4.28 Pengkategorian Variabel Penerapan <i>Good Governance</i> Berdasarkan Indikator Perencanaan Strategi	134
Tabel 4.29 Hasil Uji Validitas	136
Tabel 4.30 Hasil Uji Reliabilitas	138
Tabel 4.31 Hasil Input Variabel	139
Tabel 4.32 Hasil Nilai Korelasi atau Hubungan (R)	140
Tabel 4.33 Hasil Analisis Signifikan	141
Tabel 4.34 Hasil Analisis Koefisien Pada Analisis Regresi Sederhana	142
Tabel 4.35 Hasil Analisis Koefisien Hipotesis	143

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Penelitian	55
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BKPSDM Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022	84

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Tanggapan Responden Terhadap Pengaruh Implementasi Kebijakan SAKIP Berdasarkan Aspek Komunikasi	90
Grafik 4.2 Tanggapan Responden Terhadap Pengaruh Implementasi Kebijakan SAKIP Berdasarkan Aspek Sumberdaya	95
Grafik 4.3 Tanggapan Responden Terhadap Pengaruh Implementasi Kebijakan SAKIP Berdasarkan Aspek Disposisi	99
Grafik 4.4 Tanggapan Responden Terhadap Pengaruh Implementasi Kebijakan SAKIP Berdasarkan Aspek Struktur Birokrasi	103
Grafik 4.5 Tanggapan Responden Terhadap Penerapan <i>Good Governance</i> Berdasarkan Indikator Aturan Hukum	108
Grafik 4.6 Tanggapan Responden Terhadap Penerapan <i>Good Governance</i> Berdasarkan Indikator Transparansi	113
Grafik 4.7 Tanggapan Responden Terhadap Penerapan <i>Good Governance</i> Berdasarkan Indikator Daya Tanggap	117
Grafik 4.8 Tanggapan Responden Terhadap Penerapan <i>Good Governance</i> Berdasarkan Indikator Orientasi Kebijakan	120
Grafik 4.9 Tanggapan Responden Terhadap Penerapan <i>Good Governance</i> Berdasarkan Indikator Efektivitas dan Efisiensi	124
Grafik 4.10 Tanggapan Responden Terhadap Penerapan <i>Good Governance</i> Berdasarkan Indikator Akuntabilitas	128
Grafik 4.11 Tanggapan Responden Terhadap Penerapan <i>Good Governance</i> Berdasarkan Indikator Perencanaan Strategi	132

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Koesioner Penelitian	154
Lampiran 2 Input Data Koesioner	165
Lampiran 3 Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik kepada BKPSDM Kabupaten Tanah Bumbu	166
Lampiran 4 Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Kepada SMPN 7 Kusan Hilir	167
Lampiran 5 Surat Permohonan Permintaan Data dari Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Kepada SMPN 7 Kusan Hilir	168
Lampiran 6 Dokumenrasi Pengisian Koesioner oleh Responden	169

a